

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja pemerintah merupakan hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah). Kinerja pemerintah tidak bisa dilihat hanya dari sisi *input* dan *output*, tetapi juga dari sisi *outcome*, manfaat, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat (Nordiawan dan Hertianti, 2010). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Keuangan mendorong para kepala daerah untuk mengoptimalkan APBN dan APBD. Mengingat bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan banyak dana ke daerah (kemenkeu.go.id). Dari tahun ke tahun, pemerintah terus meningkatkan alokasi anggaran ke daerah. Namun, peningkatan alokasi anggaran tersebut tidak diikuti dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Kementerian keuangan menemukan beberapa permasalahan, seperti jumlah belanja pegawai jauh lebih besar dibanding belanja modal, penyerapan anggaran belum optimal, dan ketimpangan pelayanan publik antardaerah. Sehingga, perbaikan pada pengelolaan, perencanaan, dan *monitoring* keuangan menjadi suatu kebutuhan dan penting untuk dilakukan (cnnindonesia.com).

Meskipun sudah diatur oleh Pemerintah pada PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, namun masih terdapat

beberapa permasalahan yang terjadi pada pemerintah daerah, salah satunya yaitu pada Kabupaten Purworejo. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Sub Bagian Organisasi, pada Kabupaten Purworejo antara sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan belum terintegrasi sehingga kinerja belum efektif dan efisien. Selain itu minimnya sumber daya manusia sehingga kinerja yang dihasilkan belum optimal.

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik dan mengatasi permasalahan yang ada, Kabupaten Purworejo pada tahun 2018 melakukan upaya dengan mengimplementasikan SIMDA SAKIP (Sistem Informasi Manajemen Daerah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Implementasi SIMDA SAKIP pada Kabupaten Purworejo didasarkan pada Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati tersebut adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. SIMDA SAKIP adalah sistem untuk pelaporan kinerja yang merupakan salah satu wujud dari pengendalian internal dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dikembangkan oleh BPKP dan Kementerian PANRB dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektivitas, dan efisiensi penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah melalui pengintegrasian proses perencanaan, penganggaran, kinerja, dan keuangan (bpkp.go.id). Integrasi merupakan wujud nyata dari anggaran berbasis kinerja sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal tersebut didukung dengan Peraturan Presiden Nomor 95

Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur. Namun, setelah sistem diterapkan masih terdapat permasalahan yang terjadi. Terkait penyusunan LKjIP 2018, masih terdapat kekurangan dalam pengungkapan data dan informasi capaian kinerja pemerintah daerah, seperti belum menggambarkan integrasi antara sistem perencanaan pembangunan, sistem pembangunan, penganggaran, dan sistem akuntabilitas kinerja. Hal tersebut menunjukkan belum sepenuhnya menggambarkan penggunaan APBD tahun 2018 (bpkp.go.id).

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan dampak positif penerapan teknologi pada kinerja organisasi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hariwibowo dan Setiawan (2020) pada pemerintah daerah pedesaan di Kabupaten Wonogiri menunjukkan bahwa dengan penerapan teknologi SISKEUDES pemerintah daerah pedesaan tersebut dapat mengelola keuangan lebih efektif dan efisien. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Prameswara (2018) pada Sekretariat Daerah Bagian Keuangan Kota Denpasar menunjukkan bahwa penerapan SIPKD tergolong sukses. Hal ini terbukti bahwa pengguna merasa puas sehingga dapat meningkatkan kinerja individu, namun terdapat beberapa kekurangan seperti pengguna kurang dapat mengubah data yang tersedia sesuai kebutuhan pekerjaan dan pengguna kurang merasa aman dalam mengakses atau mengirim data melalui SIPKD. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yasa (2017) pada Sekretariat Daerah Bagian Keuangan Kabupaten Gianyar menunjukkan bahwa kepuasan karyawan dalam menggunakan SIMDA dapat mendorong terciptanya kinerja atau produktivitas

yang lebih baik dari para karyawan di Sekretariat Daerah Bagian Keuangan Kabupaten Gianyar. Hal tersebut tercermin dari hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa pengguna merasa puas dengan data dan informasi yang didapat dari SIMDA. Kemudian, penelitian yang dilakukan Tan *et al.* (2015) pada SKPD Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa dalam mengembangkan SIKD perlu memperhatikan komponen-komponen dalam pengembangan sistem seperti fleksibilitas sistem, integrasi sistem, waktu respon/perubahan, kenyamanan akses, pemulihan, dan kemudahan pengguna. Dalam penelitian tersebut, kualitas sistem merupakan penentu kesuksesan implementasi SIKD. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Iivari (2005) pada Oulu *City Council* dimana karyawan yang bekerja pada penerapan sistem informasi baru dalam organisasi tersebut menunjukkan bahwa pengguna merasa puas sehingga memberikan dampak pada kinerja.

Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian sebelumnya telah mendapatkan hasil mengenai dampak adanya beberapa sistem pemerintahan daerah. Namun, SIMDA SAKIP sendiri baru diterapkan pada tahun 2018 di Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo merupakan pemerintah daerah pertama yang mengimplementasikan SIMDA SAKIP (bpkp.go.id). Hal tersebut membuat belum diketahui dampak diterapkannya SIMDA SAKIP pada Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, kesuksesan sistem informasi pemerintah dapat diidentifikasi dengan menggunakan model DeLone dan McLean (2003). Sejak diterbitkan pada tahun 1992 dan diperbarui tahun 2003, model kesuksesan sistem informasi yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean telah banyak diterapkan pada beberapa penelitian (Tan *et al.*, 2015). DeLone dan McLean (1992)

terdiri dari enam variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan sistem informasi, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan, kepuasan pengguna, dampak individual, dan dampak organisasi. Sementara model kesuksesan DeLone dan McLean (2003) menambahkan variabel kualitas layanan ke dalam modelnya, serta menggabungkan variabel dampak individu dan dampak organisasi menjadi variabel manfaat bersih (*net benefits*). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan variabel independen kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan. Kemudian variabel mediasi dalam penelitian ini yaitu kepuasan pengguna. Peneliti tidak menggunakan variabel penggunaan karena penggunaan SIMDA SAKIP adalah wajib (*mandatory*), sedangkan penggunaan sistem lebih sesuai untuk implementasi sistem yang bersifat *voluntary*. Hal tersebut telah dibuktikan dalam penelitian Hariwibowo dan Setiawan (2020) tidak menggunakan variabel penggunaan dengan alasan bahwa SISKEUDES adalah *mandatory*. Kemudian dalam penelitian Gable *et al.* (2008) menyatakan bahwa variabel penggunaan harus dihapus dalam model DeLone dan McLean ketika penggunaan sistem informasi bersifat wajib. Selain itu, dalam penelitian Iivari (2005), menunjukkan bahwa variabel penggunaan tidak berpengaruh signifikan pada dampak individu dalam sistem informasi wajib. Kemudian, variabel dependen dalam penelitian ini yaitu manfaat bersih (*net benefits*).

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan sistem informasi dengan menggunakan model DeLone dan McLean (2003). Penelitian ini penting dilakukan karena sejak diterapkannya SIMDA SAKIP pada tahun 2018 di

Kabupaten Purworejo belum diketahui dampak penerapan sistem tersebut terhadap kinerja perangkat daerah yang dimana salah satu tujuan diterapkannya SIMDA SAKIP ini untuk meningkatkan kinerja. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dalam mengetahui faktor-faktor penentu kesuksesan apa yang menjadi poin penting sebagai saran perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam SIMDA SAKIP.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mengevaluasi mengenai implementasi SIMDA SAKIP pada Kabupaten Purworejo karena pada objek tersebut belum diketahui dampak dari implementasi SIMDA SAKIP terhadap kinerja OPD. Pemilihan OPD Kabupaten Purworejo sebagai objek penelitian karena Kabupaten Purworejo merupakan pemerintah daerah pertama yang mengimplementasikan SIMDA SAKIP (bpkp.go.id). Kabupaten Purworejo mengimplementasikan SIMDA SAKIP sejak tahun 2018. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **“Evaluasi Terhadap Implementasi SIMDA SAKIP pada Kabupaten Purworejo”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang mengenai masalah yang terjadi pada Kabupaten Purworejo dimana sebelum penerapan SIMDA SAKIP belum terintegrasi antara sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang menyebabkan kinerja belum efektif dan efisien, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menguji dampak implementasi SIMDA SAKIP terhadap kinerja OPD Kabupaten Purworejo menggunakan model DeLone dan McLean (2003). Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna?
2. Apakah kualitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna?
3. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna?
4. Apakah kepuasan pengguna berpengaruh terhadap manfaat bersih?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengevaluasi implementasi SIMDA SAKIP pada Kabupaten Purworejo yang diharapkan akan berdampak positif terhadap kinerja perangkat daerah, karena SIMDA SAKIP bersifat *mandatory* dan pada objek tersebut belum diketahui dampak dari implementasi SIMDA SAKIP terhadap kinerja OPD.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk penelitian selanjutnya mengenai implementasi SIMDA SAKIP. Sehingga dapat menjadi referensi baru untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan

penelitian lebih lanjut atau sejenis. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi generalisasi pada penelitian sejenis dengan menggunakan objek yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menerapkan SIMDA SAKIP. Hasil evaluasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja OPD dan meningkatkan kualitas SIMDA SAKIP melalui rekomendasi berdasarkan hasil penelitian ini.

